

SEKURITISASI DALAM DIPLOMASI ENERGI INDONESIA – TIONGKOK TERKAIT EKSPOR-IMPOR BATU BARA

Irma Indrayani¹, Najmi Firdaus¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional

Email : irma.indrayani@civitas.unas.ac.id, najmi.firdaus@civitas.unas.ac.id

*Korespondensi : irma.indrayani@civitas.unas.ac.id

(Submission 7-05-2024, Revisions 06-06-2024, Accepted 24-06-2024)

Abstract

This research aims to analyze securitization in energy diplomacy between Indonesia and Tiongkok which imports coal from Indonesia, which has not yet reached its maximum potential. Tiongkok is considering increasing coal imports from other countries, including from Indonesia, which is one of the main sources and one of the largest coal exporting countries in the world. Tiongkok need coal from Indonesia to meet its coal import needs. On the other hand, Indonesia is trying to carry out an energy transition which causes a conflict of economic interests. The main issue raised in this research is how the energy diplomacy carried out by Indonesia in coal exports to Tiongkok is examined based on the theory of securitization and energy security. This research uses a qualitative approach by applying the literature study/document study method. Research findings show that in relation to Indonesia's energy diplomacy with Tiongkok through coal exports, Indonesia has not been completely able to let go of dependence on coal use. At the same time, Indonesia is also required to be able to balance energy security and environmental security.

Keywords: Energy Security, Environmental Security, Diplomacy, Securitization, Indonesia, Tiongkok

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sekuritisasi dalam diplomasi energi antara Indonesia dan Tiongkok yang melakukan impor batu bara dari Indonesia, yang belum mencapai potensi maksimalnya. Tiongkok mempertimbangkan untuk meningkatkan impor batu bara dari negara lain, termasuk dari Indonesia yang menjadi salah satu sumber utama sekaligus salah satu negara pengekspor batu bara terbesar di dunia. Tiongkok membutuhkan batu bara dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan impor batu baranya. Di sisi lain, Indonesia sedang berupaya melakukan transisi energi yang menyebabkan benturan kepentingan ekonomi. Isu utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana diplomasi energi yang dilakukan Indonesia dalam ekspor batu bara ke Tiongkok, dikaji berdasarkan teori sekuritisasi dan ketahanan energi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode studi literatur/studi dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam kaitan dengan diplomasi energi Indonesia dengan Tiongkok melalui ekspor batu bara, Indonesia belum sepenuhnya mampu melepaskan ketergantungan terhadap penggunaan batu bara. Pada saat yang sama, Indonesia juga dituntut untuk mampu menyeimbangkan ketahanan energi dan keamanan lingkungan.

Kata Kunci: Ketahanan Energi, Keamanan Lingkungan, Diplomasi, Sekuritisasi, Indonesia, Tiongkok

PENDAHULUAN

Secara historis, Indonesia masih memiliki ketergantungan terhadap batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Salah satunya karena pembangkit listrik tenaga batu bara masih dipandang sebagai cara paling murah untuk memasok listrik (Ordonez dkk., 2021). Ketergantungan pada batu bara ini bisa berlangsung secara terus menerus, karena pada masa pemerintahan Jokowi terdapat rencana pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 Mega Watt (MW), dimana 25.000 MW di antaranya berasal dari batu bara (Detik Finance, 2015).

Meningkatnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu bara ini, dalam prakteknya justru bertentangan dengan komitmen terhadap dampak positif pembangunan Indonesia. Sebab, PLTU Batu bara bisa berdampak pada kerusakan lingkungan. Selain itu juga memicu timbulnya konflik lahan, dan bahkan bisa berdampak pada meningkatnya pemiskinan masyarakat yang sudah terpinggirkan. Di sinilah muncul pertanyaan: bagaimana Indonesia bisa menyeimbangkan rencana pembangunan dengan komitmen mengubah sektor energi menjadi energi terbarukan untuk mencapai target energi ramah lingkungan, namun di sisi yang lain terdapat peningkatan penggunaan energi berbasis batu bara yang justru menimbulkan hal sebaliknya?

Transformasi sistem energi penting menjaga kelestarian lingkungan. Namun, transformasi energi melibatkan berbagai isu yang sangat kompleks, mencakup unsur ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan hidup. Karena itu, transformasi energi menjadi tantangan bagi pemerintah atau pemangku kepentingan dalam melaksanakan program tersebut. Apalagi, sebagai negara dengan perekonomian terbesar di antara negara-negara ASEAN dan satu-satunya anggota G20, Indonesia tentunya telah memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan dan peningkatan mekanisme politik, ekonomi dan keamanan ASEAN. Intinya, Indonesia menempati posisi penting dalam ASEAN.

Sebagai sesama negara kelompok G-20, Indonesia dan Tiongkok juga memiliki kepentingan yang sama untuk mengamankan dan mengembangkan potensi pembangunan yang besar. Pada tahun 2013, Tiongkok memperkenalkan inisiatif “*Jalur Sutra Maritim Abad ke-21*”. Inisiatif ini memicu peningkatan hubungan resmi antara Tiongkok dan Indonesia menjadi kemitraan strategis komprehensif. Sejak saat itu, kedua negara berusaha mencapai sinergi antara inisiatif tersebut dengan strategi *Poros Maritim Global*. Termasuk di dalam strategi ini adalah ekspor batu bara dari Indonesia ke Tiongkok, yang kemudian menempatkan Indonesia menjadi pemasok utama batu bara untuk kebutuhan energi Tiongkok.

Namun demikian, diplomasi energi antara kedua negara ini masih bisa disebut belum sepenuhnya optimal. Karena pada saat yang sama, Indonesia juga sedang melakukan transisi energi yang penting, yang dengan berbagai langkah berusaha mengurangi ketergantungan pada batu bara dan beralih ke sumber energi yang lebih berkelanjutan. Hal ini terkait dengan dikeluarkannya *Kesepakatan Hijau Eropa* oleh Komisi Eropa yang mengusulkan adanya “*The Carbon Border Adjustment Mechanism*” (Mekanisme Penyesuaian Karbon Lintas). Mekanisme penyesuaian lintas karbon adalah tarif karbon yang dikenakan terhadap produk-produk yang pembuatannya secara intensif menghasilkan karbon, seperti baja, semen dan penggunaan listrik, yang diimpor lintas batas dari negara lain ke Uni Eropa.

Kebijakan ini memiliki dampak langsung yang signifikan, terutama terkait dengan “*carbon border tax*” atau tarif karbon lintas. Ada pendapat yang menyatakan bahwa hingga saat ini, Indonesia masih mengalami problematika semantik berkenaan dengan istilah-istilah konsep perdagangan dan/atau ekonomi dalam konteks politik (Sulistyo, et.al, 2023). Untuk kepentingan artikel ini, penulis menganggap bahwa padanan kata bahasa Indonesia yang tepat untuk istilah “*border carbon*” bukan

“perbatasan karbon”, namun karbon lintas karena keterkaitannya dengan lintas ekspor dan impor karbon.

Adanya "*pajak penyesuaian lintas karbon*" ini bisa menjadi penghalang perdagangan hijau yang tidak menguntungkan bagi negara-negara berkembang, dan berdampak besar pada perdagangan internasional. Terutama terkait dengan batu bara, dimana batu bara masih mendominasi sektor ketenagalistrikan di banyak negara berkembang. Kontribusi batu bara terhadap perekonomian nasional inilah yang saat ini menghadapi negara-negara berkembang pada kompleksitas masalah yang bersifat dilematis. Di satu sisi, negara berkembang seperti Indonesia membutuhkan dan memanfaatkan batu bara sebagai input untuk menopang kelangsungan hidup industri domestik berupa tenaga listrik, termasuk kontribusi batu bara berupa penerimaan devisa nasional dari hasil penjualan atau ekspor dalam bentuk komoditi ke pasar internasional. Sementara pada sisi yang lain, banyak negara yang berupaya dan bahkan mencanangkan program alternatif untuk mengganti batu bara dengan mencari energi alternatif yang lebih bersih (*clean energy*), ramah lingkungan, serta terbarukan. Program baru ini membutuhkan bantuan dana, teknologi, dan pengetahuan yang signifikan untuk mendukung kemajuan transisi energi.

Situasi ini menghadapi Indonesia pada tantangan ekonomi yang menuntut digunakannya potensi sumber daya energi terbarukan. Meskipun batu bara lebih bermanfaat dibandingkan sumber energi lainnya, namun terdapat perspektif berbeda yang mengungkapkan adanya ketidakadilan akibat ketergantungan terhadap batu bara. Pandangan inilah yang mendominasi sekuritisasi yang terjadi pada tahun 2020 dan menyebabkan guncangan bagi seluruh dunia, memperlambat kegiatan ekonomi dan mengganggu agenda transisi energi karena pemerintah perlu memprioritaskan sektor kesehatan dan sosial ekonomi terlebih dahulu (Wahyuni, 2022).

Dunia yang sedang dalam masa pemulihan dari pandemi, menjadikan banyak negara, termasuk Indonesia, berupaya untuk memulihkan perekonomiannya. Termasuk pemenuhan terhadap permintaan energi diproyeksikan meningkat secara signifikan untuk mendukung pembangunan global (Wahyuni, 2022). Dinamika ini juga mencakup banyaknya kepentingan dalam industri batu bara dari kelompok lobi dan oligarki yang membentuk ketahanan energi. Selain itu, terdapat kompleksitas yang berasal dari ketidakpastian politik internasional, yang menjadikan negara-negara berkembang rentan untuk mengamankan ekonominya dalam menghadapi perubahan global.

Dari sisi produksi, produksi batubara Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga 2021. Selama tiga tahun tersebut, produksi batu bara Indonesia meningkat sebesar 35% atau sekitar 158 juta ton. Data pada Kementerian ESDM (MODI ESDM, 2022) menyebutkan bahwa pada tahun 2016, produksi batubara Indonesia sebesar 456 juta ton. Pada tahun 2021, produksi batubara Indonesia meningkat menjadi 614 juta ton. Sementara pada sisi konsumsi, tahun 2016 konsumsi batu bara Indonesia sebesar 91 juta ton atau sekitar 20% dari produksi batubara sebesar 456 juta ton. Sedangkan pada tahun 2021, konsumsi batu bara Indonesia sebesar 133 juta ton atau sekitar 21% dari produksi batubara sebesar 614 juta ton. Ini menunjukkan bahwa konsumsi batu bara Indonesia meningkat sebesar 46% atau sebanyak 42 juta ton selama tiga tahun tersebut.

Selain kebutuhan konsumen, Indonesia juga mengekspor batu bara. Merujuk pada data Kementerian ESDM (MODI ESDM, 2022) menyebutkan bahwa pada tahun 2016, ekspor batu bara Indonesia sebesar 365 juta ton, dan pada tahun 2021, ekspor batu bara Indonesia sebesar 435 juta ton atau mengalami peningkatan sebesar 19%, atau sebanyak 70 juta ton. Dengan cadangan batu bara yang besar ini, membuat Tiongkok memutuskan untuk mengimpor batu bara dari Indonesia. Data pada Kementerian ESDM (MODI ESDM, 2022) juga menyebutkan bahwa ekspor batu bara ke Tiongkok pada tahun 2016 hingga 2018 tidak banyak mengalami perubahan. Pada kurun waktu tersebut, ekspor ke

Tiongkok meningkat sebesar 19% atau 10 juta ton. Pada tahun 2016, ekspor batubara dari Indonesia ke Tiongkok mencapai 54 juta ton, dan pada tahun 2018 sebanyak 63 juta ton. Jumlah ekspor tersebut merupakan peningkatan pasokan untuk memenuhi kebutuhan batu bara Tiongkok sekitar 25%.

Tiongkok sendiri sebenarnya dikenal sebagai negara penghasil batu bara terbesar di dunia. Namun, Tiongkok tetap melakukan impor batu bara dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energinya. Selain itu, Tiongkok juga mengimpor batu bara dari berbagai negara seperti Australia dan Rusia. Namun, hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Australia mengalami ketegangan, yang mengakibatkan pengurangan impor batu bara dari Australia sejak tahun 2019. Sebagai akibatnya, Tiongkok terpaksa mencari alternatif pasokan batu bara. Indonesia menjadi salah satu opsi utama pengganti impor batu bara selain dari Australia. Inilah yang menandai pentingnya diplomasi energi antara Indonesia dan Tiongkok dalam mempertahankan ketersediaan pasokan energi yang stabil. Pada saat yang sama, kerja sama Tiongkok dan Indonesia juga dihadapkan dengan tantangan untuk mencari langkah-langkah menyeimbangkan perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji diplomasi energi batu bara antara Indonesia–Tiongkok dalam kaitannya dengan konsistensi sekuritisasi komitmen terhadap kelangsungan program transisi energi bersih yang terbarukan bagi Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan batu bara terbanyak di dunia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode studi literatur/dokumen. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan adanya analisis yang mendalam dan sistematis terhadap data yang dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, sumber data meliputi wawancara, observasi, dan dokumen. Menurut John W. Creswell (2015), dokumen dapat berupa berbagai jenis, seperti buku, artikel, atau dokumen resmi, yang digunakan untuk mendeskripsikan secara objektif dan sistematis tentang data yang dihimpun dalam penelitian. Dalam hal ini, data tersebut diantaranya meliputi ekspor batu bara dan kaitannya dengan ketahanan energi dan keamanan lingkungan.

• Kajian Teoritis

Diplomasi energi merupakan perluasan praktik diplomasi ke dalam perdagangan energi bagi negara-negara yang bergantung pada pasokan energi, seperti Indonesia dan Tiongkok. Aalto (2016) menjelaskan bahwa diplomasi energi melibatkan kerja sama antara pemerintah dan perusahaan energi untuk mempromosikan perdagangan energi dan mengamankan pasokan domestik. Dalam konteks ini, ekspor batu bara Indonesia ke Tiongkok merupakan bentuk konkret dari diplomasi energi, di mana kedua negara bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan energi Tiongkok. Sebagai ekspor utama Indonesia, batu bara tidak hanya menjadi sumber pendapatan penting bagi negara, tetapi juga memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok.

Namun, dinamika ekspor batu bara ini tidak hanya terkait dengan pertukaran ekonomi semata. Teori sekuritisasi menyoroti bagaimana suatu isu dapat dianggap sebagai ancaman keamanan dan dijadikan sebagai fokus politik. Buzan, Waever, dan Wilde (1998) menjelaskan bahwa proses sekuritisasi melibatkan langkah-langkah darurat untuk mengatasi ancaman yang dirasakan. Dalam konteks ekspor batu bara, Tiongkok dapat menganggap ketergantungan mereka terhadap impor batu bara sebagai isu keamanan energi yang perlu diatasi melalui diplomasi energi dengan Indonesia. Karena bagi

Tiongkok, impor batu bara ini berkaitan dengan kepastian pasokan yang stabil dan pengurangan ketergantungan terhadap sumber daya energi yang berasal dari luar negeri.

Jadi, konsep ketahanan energi menjadi aspek penting dalam hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok. Konsep ketahanan energi, seperti ketersediaan, aksesibilitas, keberlanjutan, dan keamanan pasokan energi, menjadi hal yang relevan untuk memahami dinamika ekspor batu bara antara kedua negara (International Energy Agency, 2022). Dengan memperhitungkan aspek-aspek ini, penelitian tentang diplomasi energi Indonesia ke Tiongkok dalam ekspor batubara menjadi relevan. Terutama untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan antara diplomasi energi, sekuritisasi, dan ketahanan energi dalam konteks perdagangan energi global. Selain itu, ekspor batu bara Indonesia ke Tiongkok juga penting untuk dikaji sebagai upaya untuk lebih mendalami diplomasi energi, sekuritisasi, dan ketahanan energi dalam kaitannya dengan dinamika hubungan antara kedua negara, terutama dalam hal perdagangan batu bara.

Diplomasi energi memainkan peran yang signifikan dalam memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Karena batu bara merupakan sumber daya penting bagi Indonesia. Selain itu, konsep sekuritisasi fokus pada bagaimana suatu isu, sebagai contoh, ketergantungan Tiongkok pada impor batu bara, dapat dianggap sebagai ancaman keamanan energi yang memerlukan langkah-langkah darurat untuk solusinya. Dengan menggunakan teori sekuritisasi, penelitian ini diharapkan dapat mengeksplorasi bagaimana isu-isu keamanan energi mempengaruhi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok, serta bagaimana kedua negara merespon ancaman yang dirasakan terkait dengan ekspor batubara. Dengan memahami konsep ketahanan energi, penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi dampak ekspor batu bara terhadap ketahanan energi Indonesia dan Tiongkok, serta implikasinya dalam jangka panjang bagi kedua negara.

PEMBAHASAN

Ekspor batu bara memiliki peranan penting dalam diplomasi energi, terutama dalam konteks ketergantungan dunia pada sumber energi ini. Indonesia sebagai produsen batu bara terbesar, memiliki peranan penting dalam pasokan global. Namun, kebijakan ekspor batu bara juga harus diimbangi dengan target *energi nol bersih* dan perlombaan menuju energi ramah lingkungan. Dalam beberapa tahun ke depan, berdasarkan pada KTT G20, transisi energi fokus pada penggunaan energi baru terbarukan dan meninggalkan sumber energi tidak dapat diperbarui seperti batu bara.

Meskipun sudah ada kesepakatan penggunaan energi baru, batu bara masih akan digunakan dalam beberapa tahun ke depan, dengan penurunan penggunaan secara bertahap hingga tahun 2052. Karena itu, dalam konteks diplomasi energi, ekspor batu bara dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kerja sama antar negara dan meningkatkan pasokan energi. Dengan catatan, kebijakan ekspor batu bara harus diimbangi dengan kepentingan lingkungan dan target *energi nol bersih*. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan kerja sama antar negara untuk mencapai tujuan energi ramah lingkungan.

• Peran Batu Bara Dalam Perekonomian Indonesia

Selain perannya di sektor energi, batu bara juga merupakan salah satu faktor penting dalam produk pertambangan nasional. Selama empat tahun terakhir, pendapatan batu bara yang dikumpulkan rata-rata sekitar Rp 31 triliun (2,17 miliar USD) atau rata-rata mendekati 80% dari total pendapatan nonmigas. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2012 menyebutkan bahwa kontribusi sektor batu bara

terhadap penerimaan negara dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu: sewa tanah, royalti/pajak, dan penjualan batu bara.

Menurut Mariatul Aini (climate-transparency.org, 2018), penjualan menjadi kontribusi terbesar dari sektor batu bara terhadap penerimaan negara, baik dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya, jumlah produksi dan ekspor batu bara meningkat dalam empat tahun terakhir karena harga batu bara naik dari 60 menjadi 100 USD. Namun demikian, kontribusi pendapatan batu bara terhadap APBN relatif rendah, yaitu sekitar 1,5 hingga 2 % dari total pendapatan. Jadi, harga batubara mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produksi dan ekspor batu bara. Adapun alasan pemerintah melakukan eksplorasi batu bara adalah untuk meningkatkan pendapatan perdagangan dan membantu mengimbangi defisit perdagangan minyak dan gas (Syahni, 2018).

Persoalannya, impor Indonesia sendiri mengalami peningkatan sebesar 22,2 % dari tahun 2017. Ini terutama didominasi oleh peningkatan impor bahan baku industri dan bahan bakar (Satu Data Kementerian Perdagangan, 2019). Selain itu, merujuk pada pernyataan Faisal Basri yang menyebut defisit perdagangan barang Indonesia pada tahun 2018 merupakan pertama dalam sejarah. Data dari Bank Indonesia, defisit perdagangan pada tahun 2018 mencapai 431 USD. Hal ini terjadi akibat impor barang yang mencapai 181,18 miliar USD, sedangkan ekspor barang hanya 180,75 miliar USD. Ini berarti kenaikan impor pada 2018 tiga kali lebih tinggi dari impor barang. Impor naik sebesar 21 persen, sedangkan ekspor hanya naik 7 persen. (CNN, 2019). Tren ini diprediksi terus berlanjut pada tahun 2019 dan masa mendatang. Karena itu, pemerintah masih mempertimbangkan ekspor batu bara sebagai salah satu opsi untuk menyeimbangkan defisit perdagangan, mengingat harga batu bara internasional tetap tinggi yaitu >90 USD/ton, sambil menyusun strategi dalam mengurangi impor barang konsumsi.

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menyatakan bahwa bahan bakar fosil masih didukung dengan mewakili 8% dari total anggaran Indonesia dalam bentuk uang tunai di sebagian besar paket. PEN 2020 juga mendukung sumber energi yang lebih bersih, namun hanya biodiesel yang menerima suntikan dana langsung. Investasi pada bahan bakar fosil dinilai masih lebih menarik dibandingkan sumber energi terbarukan. Oleh karena itu, pertarungan antara ketahanan energi dan transisi energi akan sangat sulit untuk dilaksanakan karena pemerintah terpaksa menghadapi dilema lain. Kebijakan yang lebih kuat dan paket yang lebih menarik bagi investor untuk mempercepat transisi ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan, sangat diperlukan untuk menjaga komitmen mitigasi perubahan iklim Indonesia tetap pada jalurnya.

• **Ekspor Batu Bara Indonesia Ke Tiongkok**

Hubungan Tiongkok dan Indonesia dimulai pada tahun 1950. Hal ini terlihat dari pengakuan Indonesia atas kedaulatan Tiongkok pada tanggal 15 Januari 1950. Kedua negara ini pun mulai menyusun nota kerja sama. Namun, hubungan Indonesia dan Tiongkok putus ketika terjadi peristiwa G30S PKI. Indonesia menilai Tiongkok terlibat dalam peristiwa G30S PKI. Seiring berjalannya waktu, kedua negara mulai memperbaiki hubungan mereka. Pada tanggal 8 Agustus 1990, Indonesia dan Tiongkok menandatangani "*Memorandum Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tentang Dimulainya Kembali Hubungan Diplomatik*". Dengan demikian, hubungan Indonesia dan Tiongkok mulai membaik dan terjalin kerja sama di berbagai sektor, salah satunya sektor energi (Sukma, 2009).

Indonesia dan Tiongkok kemudian sepakat membentuk forum kerja sama energi pertama pada Forum Energi Indonesia-Tiongkok (ICEF) melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) pada 24

Maret 2002 di Beijing, Tiongkok. Perjanjian ini menjadi bagian penting bagi kedua negara karena merupakan forum pertemuan untuk melihat peluang kerja sama dan investasi di bidang pertambangan (Sinaga, 2013). Pada tahun 2020, Indonesia memiliki cadangan batu bara sebesar 38,84 miliar ton. Cadangan batu bara tersebut diasumsikan akan habis dalam 65 tahun ke depan jika rata-rata produksi batubara Indonesia sebesar 600 juta ton dan tidak ditemukan cadangan batubara baru (ESDM, 2021).

Adanya konsekuensi pembatasan impor batu bara dari Australia yang dilakukan oleh Tiongkok, menjadikan negara tersebut perlu meningkatkan impor batu bara dari negara lain, salah satunya Indonesia. Tiongkok perlu mengimpor batu bara dari Indonesia karena Indonesia memiliki cadangan batu bara yang lebih banyak dibandingkan Australia, selain Tiongkok juga melakukan impor batu bara dan beberapa negara lain seperti Rusia, Mongolia, dan Amerika Serikat. Karena itu, Tiongkok dan Indonesia semakin mempererat kerja sama di bidang perekonomian, baik investasi maupun perdagangan. Tiongkok perlu melakukan upaya terkait impor batu bara dari Indonesia, terutama untuk mengamankan pasokan batu baranya dari Indonesia.

Setelah dilakukan perjanjian kerja sama antara Tiongkok dan Indonesia mengenai perdagangan batu bara, terjadi peningkatan ekspor batu bara Indonesia ke Tiongkok. Data pada Kementerian ESDM (2020) menunjukkan bahwa ekspor batu bara Indonesia ke Tiongkok pada tahun 2018, sebesar 63 juta ton. Namun setelah pembatasan impor batu bara dari Australia oleh Tiongkok, dan Tiongkok melakukan perjanjian kerja sama dengan Indonesia, ekspor batu bara Indonesia ke Tiongkok pada tahun 2019 naik menjadi sebesar 144 juta ton. Ekspor batu bara dari Indonesia ini dapat memenuhi 47% dari 308 juta ton kebutuhan Tiongkok (IEA, 2020). Pada tahun 2020, menurut Kementerian ESDM (2020), ekspor batu bara Indonesia ke Tiongkok mengalami penurunan sebesar 12% menjadi 127 juta ton.

Tabel 1. Ekspor Batu Bara Indonesia ke Tiongkok sepanjang 2016-2022

Ekspor Batu Bara Menurut Negara Tujuan Utama, 2016 - 2022							
Negara tujuan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Berat bersih: 000 Ton							
Tiongkok	50,961.10	48,167.40	48,135.70	65,670.50	62,492.50	108,487.20	69,685.70
Nilai FOB: 000 000 US\$							
Tiongkok	2,097.00	2,714.60	2,760.10	3,143.00	2,652.70	9,143.10	7,795.20

Catatan:

Diolah dari dokumen kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai (PEB dan PIB)

Sumber: *BPS Exports of Coal by Major Countries of Destination, 2012-2022*

Meskipun terjadi penurunan impor batu bara dari Indonesia, namun setidaknya impor batu bara dari Indonesia telah memenuhi kebutuhan batu bara Tiongkok, yaitu sebesar 40% dari 314 juta ton kebutuhan setiap tahun (IEA, 2021). Pada tahun 2021, ekspor batu bara Indonesia ke Tiongkok meningkat sebesar 54% menjadi 196 juta ton (BPS., 2022). Ekspor batubara Indonesia pada tahun 2021 dapat memenuhi kuota impor batu bara Tiongkok sebesar 58% dari 338 juta ton (IEA, 2022). Namun pada tahun 2022, impor batu bara Tiongkok dari Indonesia menurun 13% dibanding tahun 2021, yaitu menjadi 170 juta ton (Dry Bulk Market, 2022).

Ekspor batu bara Indonesia pada tahun 2022 dapat memenuhi kebutuhan batu bara Tiongkok sebesar 60% dari 285 juta ton (IEA, 2022). Secara keseluruhan, impor batu bara Tiongkok dari tahun

2019 hingga 2022 meningkat sebesar 18%. Kemudian tahun 2019 menjadi sebesar 144 juta ton, dan tahun 2022 sebesar 170 juta ton. Pada tahun 2020, impor batu bara Tiongkok dari Indonesia merupakan yang terendah sepanjang tahun 2019 hingga 2022, yakni sebesar 127 juta ton. Pada tahun 2021, impor batu bara Tiongkok dari Indonesia menjadi yang tertinggi sepanjang tahun 2019 hingga 2022, yaitu sebesar 196 juta ton. Dengan adanya perjanjian kerja sama antara Tiongkok dan Indonesia, maka Tiongkok dapat memenuhi kebutuhan impor batu baranya setelah adanya pembatasan impor batu bara dari Australia pada tahun 2019.

- **Sekuritisasi Kebijakan Energi antara Indonesia dan Tiongkok**

Teori sekuritisasi merupakan studi yang membahas mengenai *survival* (Buzan *et al*, 1998). Sekuritisasi dalam artikel ini, digunakan untuk memahami bagaimana Indonesia membangun keamanan energi termasuk transisi energi yang dilakukan Indonesia dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Teori sekuritisasi berpendapat bahwa keamanan dikonstruksi secara sosial melalui praktik diskursif. Pada implementasinya, sekuritisasi juga fokus pada bagaimana suatu masalah menjadi atau berubah menjadi ancaman keamanan (Hough dkk., 2015).

Dalam kaitan dengan pemahaman sosial bersama terhadap ancaman, teori sekuritisasi sangat menekankan pada proses. Pada tahapan sebuah isu dipahami sebagai “ancaman eksistensial”, maka hal tersebut membuat negara berupaya menahan ancaman tersebut dengan berbagai cara sehingga tidak lagi jadi ancaman. Ketahanan energi sering digunakan untuk mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara sebagai bagian dari agenda pembangunan. Meski demikian, pada implementasinya kurang memperhatikan agenda perubahan iklim sebagai isu keamanan. Oleh karena itu, penerapan teori sekuritisasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memahami bagaimana konsep keamanan energi dalam kebijakan energi dan pembangunan Indonesia menjadi prioritas dibandingkan dengan kebijakan perubahan iklim.

Pada pemerintahan Jokowi bisa dilihat bagaimana pembangkit listrik tenaga batu bara semakin banyak dibangun. Ini menjadikan komitmen pemerintah terhadap target pengurangan karbon terkesan hanya sekedar simbolis. Apalagi, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (2019) menunjukkan bahwa pembangkit listrik tenaga batu bara menyumbang hingga 97,22% dari keseluruhan emisi sektor energi Indonesia. Ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah masih menggunakan retorika ketahanan energi di balik kebijakan infrastruktur atau pembangunannya. Kondisi ini juga menggambarkan bagaimana sektor energi yang “disekuritisasi” tersebut, malah berdampak pada keputusan pemerintah untuk membangun lebih banyak pembangkit listrik.

Ketahanan energi bisa diartikan sebagai kemandirian energi. Merujuk pada pernyataan mantan Menteri Pertahanan pada pemerintahan Yudhoyono, Purnomo Yusgiantoro, kemandirian energi terdiri dari kemampuan merespons dinamika perubahan energi global dan kemampuan menjamin ketersediaan energi di dalam negeri dengan harga yang wajar (CNBC, 2020). Pandangan ini juga dianut oleh pemerintah saat ini, yang tercermin melalui Rencana Umum Energi Nasional (NEGP), yang menekankan paradigma sumber daya energi sebagai modal pembangunan dalam negeri untuk mencapai kemandirian energi (Kementerian ESDM, 2017). Posisi yang tidak biasa ini juga dikuatkan oleh keyakinan bahwa negara ini memiliki sumber daya alam, khususnya yang melimpah di Indonesia dan kini memainkan peran sentral sebagai eksportir batu bara terbesar di dunia (Esterman, 2021).

Pada tahun 2015, Indonesia memproduksi total 461,6 juta ton batu bara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 79,3% diekspor, sementara hanya 20,7% dipasok ke pasar dalam negeri, yang sebagian besar ditujukan untuk pembangkit listrik (Kementerian ESDM, 2017; RPJMN 2015-2019). Pada saat yang sama, pemerintah juga berencana membangun pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW, dimana

25.000 MW di antaranya berasal dari batubara (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2015). Program pembangunan ini diperlukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan listrik diperkirakan akan terus meningkat dari waktu ke waktu.

Dari data ini, bisa diasumsikan bahwa pengamanan sektor energi untuk kebutuhan pembangunan bisa menjadi penghambat bagi upaya Indonesia untuk mengurangi emisi karbon. Jika kita amati, pemerintah di satu sisi menyatakan akan mengurangi emisi karbon di sektor batu bara, tetapi di sisi yang lain terdapat urgensi untuk memaksimalkannya. Dalam kaitan ini, pemerintah tidak menyebut batu bara dan pengembangan pembangkit listrik tenaga batu bara dalam kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) (Atteridge dkk., 2018). Adapun agenda pengurangan emisi, lebih banyak berfokus pada permasalahan kehutanan dan tata guna lahan dengan mengatasi deforestasi.

Selain itu, dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT), energi baru yang mencakup sumber energi yang berasal dari pengolahan bahan bakar fosil dengan menggunakan teknologi modern, juga seringkali diatur bersamaan dengan energi terbarukan. Misalnya, gasifikasi batu bara, pencairan batu bara, dan metana batu bara dianggap sebagai sumber energi baru. Pengembangan sumber-sumber energi ini mungkin merugikan, karena ini bisa mengalihkan perhatian dari sepenuhnya mengembangkan energi terbarukan sekaligus mengurangi emisi rendah karbon (Anindarini, 2020). Selain itu, pemerintah juga lebih fokus untuk menarik investasi sebagai sumber pendanaan transisi energi (Merdeka.com, 2022), karena tanpa bantuan keuangan, kemajuan Indonesia dalam melakukan transformasi energi terbarukan akan stagnan. Sementara, pendanaan terkait iklim dari kalangan internasional masih kurang, dan ini menjadi faktor penyebab transformasi energi terbarukan tidak berkembang.

Dengan demikian, bisa dinyatakan bahwa konsep ketahanan energi Indonesia dalam sekuritisasi energi dilakukan karena pertimbangan ekonomi. Persoalannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkatkan kebutuhan energi dalam negeri. Inilah yang kemudian memunculkan adanya potensi ancaman kekurangan sumber daya energi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah menyarankan untuk mengurangi ekspor batu bara dan mengalihkan penggunaan batu bara ke dalam agenda pembangunan ekonomi untuk memenuhi peningkatan kebutuhan energi dalam negeri. Alasan lain dari keputusan ini juga karena Indonesia mempunyai pasokan batu bara yang murah dan terjangkau dalam jumlah yang besar. Selain itu, Indonesia juga memiliki kemampuan finansial yang kurang sehingga menjadi alasan untuk terus menggunakan batu bara.

Di sisi lain, diplomasi energi merupakan suatu bentuk diplomasi yang bertujuan untuk membangun hubungan kerja sama antarnegara untuk menjaga pasokan energi negaranya. Bagi negara konsumen energi, diplomasi energi menjadi instrumen untuk mengamankan akses pasar energi agar aman dan energi tetap terjaga. Berbeda dengan negara-negara penghasil energi, diplomasi energi menjadi instrumen bagi negara-negara produsen untuk meningkatkan hubungan perdagangan energi dengan negara lain. Bagi negara-negara transit energi, diplomasi energi digunakan sebagai penghubung antara negara konsumen dan negara produsen (Bertrand, 2010).

Diplomasi energi dapat dimanfaatkan suatu negara untuk meningkatkan kekuatannya sehingga dapat mengamankan akses terhadap sumber energi dan pasar energi. Diplomasi energi juga sejalan dengan kepentingan nasional suatu negara untuk menjaga stabilitas, keamanan energi, dan mengembangkan perekonomian nasional (Bovan *et al.*, 2020). Menurut Wang & Xu (2022) terdapat enam kegiatan diplomasi energi, yaitu: *Pertama*, dialog terkait energi antar negara. Dialog antar negara terkait energi merupakan bagian integral dalam pelaksanaan diplomasi energi. Melalui dialog ini, negara dapat memastikan pasokan energinya terjamin. Dialog energi ini dilakukan antarnegara produsen atau antarnegara konsumen. Intinya, negara produsen dan konsumen dapat terlibat dalam dialog. Dialog

ini dapat dilakukan secara bilateral maupun multilateral.

Selain itu, dialog ini dapat dilakukan dalam forum yang disponsori pemerintah dengan melibatkan aktor lain, misalnya perusahaan energi. Tujuan dari dilakukannya dialog energi ini, antara lain adalah mengoordinasikan strategi dan kebijakan energi, meningkatkan pemahaman negara-negara mengenai energi, menghilangkan hambatan politik dan ekonomi, menentukan arah kerja sama energi antarnegara, dan memberikan jaminan politik untuk memfasilitasi proyek-proyek berskala besar.

Kedua, keterlibatan langsung pemerintah dalam kemitraan energi. Dalam diplomasi energi, pemerintah berperan penting dalam menjalin kerja sama energi dengan negara mitranya. Keterlibatan pemerintah dalam diplomasi energi berfokus pada negosiasi seputar kemitraan internasional, menghilangkan hambatan politik, komitmen politik terhadap proyek energi berskala besar, menetapkan pedoman dalam negosiasi, membantu perusahaan energi untuk membangun kerja sama energi dengan negara mitra, dan pemimpin negara atau mereka yang terlibat dalam struktur pemerintahan negara turut serta menyaksikan penandatanganan kerja sama energi.

Ketiga, langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi hubungan energi internasional. Dalam hubungan internasional antarnegara, diplomasi energi banyak digunakan oleh negara-negara terkemuka di dunia untuk melakukan kegiatan diplomasi terkait energi yang dapat memberikan manfaat bagi negaranya. Dalam hal ini, fokus utama pemerintah dalam hubungan energi internasional berkisar pada perubahan iklim dan kebijakan dalam negeri. Tujuan utama pemerintah untuk mempengaruhi hubungan energi internasional melalui kebijakan dalam negerinya antara lain mengembangkan strategi energi nasional, menyesuaikan kebijakan fiskal, menetapkan undang-undang terkait eksplorasi sumber daya, dan menciptakan kepentingan di berbagai sektor.

Keempat, persaingan energi antarnegara. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya energi antarnegara menjadi sangat ketat, terutama di antara negara-negara besar. Dalam persaingan energi antarnegara, setiap negara tidak hanya menggunakan energi untuk melakukan bisnis, namun juga menggunakan kekuatan politik, ekonomi, bahkan militer untuk mencapai kepentingan energinya dan kepentingan lainnya. Seringkali negara menggunakan kekuatannya untuk melindungi sumber daya energi dan jaringan transportasi energinya.

Kelima, kegiatan energi organisasi internasional mengkhhususkan diri dalam koordinasi aktivitas energi internasional antarnegara. Kerjasama dan komunikasi ini berdampak signifikan terhadap pasar energi internasional. Saat ini terdapat puluhan lembaga energi internasional di dunia, dan yang paling berpengaruh adalah IEA, OPEC (Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak), Forum Energi Internasional, Organisasi Perjanjian Piagam Energi, Dewan Energi Dunia, dan Dewan Energi Dunia serta Kongres Perminyakan.

Keenam, kegiatan diplomasi energi publik. Diplomasi energi publik mengacu pada aktor non negara seperti perusahaan energi, asosiasi energi, dan aktor non-negara lainnya. Keterlibatan aktor non negara dalam diplomasi energi pada dasarnya ditujukan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan rasa saling percaya dengan negara tujuan sehingga kerjasama energi dapat berjalan dengan baik. Dalam diplomasi energi publik, asosiasi energi mempunyai peran yang sama dalam membantu pemerintah untuk melakukan kerja sama energi dengan negara tujuan. Secara internal, tujuan pembentukan asosiasi energi adalah untuk melindungi kepentingan perusahaan anggota dan menjadi jembatan komunikasi antara perusahaan dan pemerintah. Secara eksternal, asosiasi energi akan saling berkoordinasi dengan perusahaan anggota untuk mengambil tindakan bersama, mewakili perusahaan dalam negosiasi dengan mitra asing, dan bekerja sama dengan pemerintah dalam melaksanakan kerja sama energi dengan negara mitra.

Merujuk pada Qinhua (2007), diplomasi energi Tiongkok memiliki beberapa strategi.

Pelaksanaan diplomasi energi Tiongkok tidak hanya fokus pada membangun kerja sama energi melalui kerja sama bilateral, tetapi Tiongkok juga mendukung perusahaan energi nasionalnya untuk terlibat dalam memperkuat kerja sama energi Tiongkok dengan negara lain. Selain itu, kerja sama bilateral Indonesia dan Tiongkok ini dilakukan karena adanya saling ketergantungan antara kedua negara. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah, sedangkan Tiongkok, meski memiliki sumber daya alam, namun Tiongkok masih belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh rakyatnya, khususnya di sektor pertambangan.

Pada tahun 2019, Tiongkok mulai mengurangi impor batu bara dari Australia. Pengurangan impor batu bara ini berdampak pada kebutuhan konsumsi batu bara Tiongkok, sehingga Tiongkok perlu meningkatkan impor batu bara dari negara lain, salah satunya Indonesia. Tiongkok dan Indonesia sudah lama membentuk forum kerja sama pertambangan. Hal ini akan memudahkan kedua negara untuk menjalin perjanjian kerja sama batu bara sehingga Tiongkok dapat terus meningkatkan impor batu baranya dari Indonesia.

Qinhua (2007) menjelaskan, terkait diplomasi energi Tiongkok, terdapat beberapa strategi yang digunakan oleh Tiongkok dalam melaksanakan diplomasi energinya. *Pertama*, Tiongkok mengundang Indonesia untuk mengadakan pertemuan di Tiongkok pada 10 April 2019. Pertemuan Tiongkok dan Indonesia ini membahas perkembangan kerja sama batu bara, khususnya pada kegiatan ekspor dan impor batu bara. Pertemuan ini menjadi awal bagi Tiongkok untuk bisa meningkatkan impor batu bara dari Indonesia, sebagai salah satu negara pengekspor batu bara terbesar di dunia. Pertemuan ini menjadi forum bagi Tiongkok dan Indonesia untuk membahas kerjasama batubara. Selanjutnya dilakukan kunjungan pada tanggal 23–26 Mei 2019. Agenda kunjungan tersebut adalah melaksanakan penandatanganan *MoU* antara CNCA sebagai perwakilan Tiongkok dan APBI sebagai perwakilan Indonesia. Dalam kerja sama ini juga disepakati adanya bantuan terhadap Indonesia terkait pengembangan teknologi batu bara ramah lingkungan, meningkatkan nilai tambah batu bara, dan lain sebagainya (APBI, 2019).

Kedua, dialog antara Tiongkok dan Indonesia yang dilakukan melalui “*Tiongkok-Indonesia Coal Procurement Matchmaking Meeting*” yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 25 November 2020. Pada dialog ketiga ini, pemerintah Tiongkok mendukung CCTDA dengan mengadakan pertemuan dengan delegasi Indonesia (APBI, Menteri Koordinator Bidang Maritim Indonesia Luhut Binsar Panjaitan) secara virtual melalui forum “*Tiongkok-Indonesia Coal Procurement Matchmaking Meeting*”. Delegasi Tiongkok berada di Guangxi, dan delegasi Indonesia di Jakarta. Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Liang Jia Kun dari CCTDA dan Pandu Patria Sjahrir dari APBI. Selain itu, pemerintah Tiongkok yang diwakili oleh Menteri Perdagangan Tiongkok, Peng Gang dan Duta Besar RRT untuk Indonesia Xiao Qian menyaksikan penandatanganan kerja sama antara CCTDA dan APBI. Kerja sama ini dapat membantu menjaga pasokan batu bara impor Tiongkok, membantu pembeli dari Tiongkok dengan produsen batu bara di Indonesia, dan meningkatkan perdagangan bilateral antara Tiongkok dan Indonesia (Media Indonesia, 2020).

Asosiasi energi Tiongkok menyatakan bahwa sangatlah penting bagi pemerintah Tiongkok untuk menjalin kerja sama batu bara dengan Indonesia. Asosiasi energi Tiongkok yang bekerja sama dengan Indonesia terkait perdagangan batu bara adalah *Tiongkok National Coal Association (CNCA)* dan *Tiongkok Coal Transportation and Distribution Association (CCTDA)*. CNCA adalah asosiasi batu bara terbesar di Tiongkok. CNCA dibentuk pada tahun 1998 dan memiliki lebih dari 1.100 anggota dari berbagai perusahaan batu bara yang bergerak di bidang produksi, penjualan, infrastruktur, eksplorasi geologi, dan teknologi batubara. CNCA membantu Tiongkok untuk melakukan kerja sama industri batu bara dengan negara tujuan, mempromosikan teknologi industri batu bara, dan

merekomendasikan kebijakan yang akan diambil pemerintah terkait industri batubara (CNCA, 2022).

Sementara CCTDA, adalah asosiasi yang bergerak di bidang transportasi dan distribusi batu bara di Tiongkok. CCTDA didirikan pada Agustus 1998 dan terdiri dari perusahaan transportasi dan distribusi batu bara nasional, lembaga penelitian, dan organisasi lokal yang bergerak di sektor batubara. CCTDA dapat membantu perusahaan dan pemerintah memperkuat koordinasi transportasi dan distribusi batubara (CCTDA, 2022).

Kerjasama bilateral Tiongkok dan Indonesia di bidang energi sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan bahwa kedua negara saling membutuhkan. Meskipun Tiongkok mempunyai cadangan batu bara sendiri, namun pemerintah Tiongkok membatasi eksploitasi batu bara di dalam negerinya dengan alasan lingkungan. Pemerintah Tiongkok memperbolehkan perusahaan Tiongkok mengimpor batu bara dari negara lain, salah satunya Indonesia. Tiongkok membutuhkan tambahan impor batu bara dari Indonesia yang disebabkan meningkatnya pasokan permintaan batu bara di negaranya. Sementara Indonesia memiliki banyak cadangan batu bara di dalam negeri.

Keputusan Tiongkok untuk mengimpor batu bara dari negara lain, yang antara lain dari Indonesia, meskipun memiliki cadangan tambang domestik yang sangat besar sebenarnya bukan merupakan bentuk inovasi kebijakan politik yang baru. Kebijakan importasi energi semacam itu telah dilakukan negara lain, yakni Amerika Serikat (Amerika) yang lebih mengutamakan untuk mengimpor energi minyak dari pasar dunia dibandingkan dengan mengeksplorasi dan mengeksploitasi tambang domestiknya sendiri.

Kebijakan energi Amerika dalam mengimpor minyak mentah merupakan bagian dari strategi dan sekaligus sumber pembiayaan bagi belanja politik luar negerinya untuk memperkuat ketahanan ekonominya sendiri. Pada pelaksanaan politik luar negerinya, pemilihan negara asal impor menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan. Amerika akan selalu memprioritaskan importasi dari negara penghasil minyak dimana perusahaan asal Amerika adalah pemegang hak eksploitasinya. Hal ini dilakukan karena melalui perusahaan yang beroperasi di negara asal impor, Amerika dapat memainkan politik luar negerinya terhadap negara importir. Sebagai contoh dapat dilihat dalam pilihan kebijakan Amerika untuk mengimpor minyak dari kawasan Timur Tengah atau negara berkembang lainnya dalam rangka penyelenggaraan kepentingan dominasi politik luar negerinya. Meski demikian, kebijakan ini tidak dilakukan Amerika terhadap Kanada yang memiliki jumlah besar stok pasokan ekspor energi yang melimpah untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri Amerika.

Penulis berpendapat bahwa meskipun Tiongkok dan Amerika memiliki kesamaan preferensi tindakan politik untuk mengimpor energi daripada mengeksploitasi sumber daya alam domestik, namun keduanya memiliki perbedaan signifikan dalam konteks diplomasi luar negeri. Amerika menempatkan perdagangan internasional sebagai bagian integral dan sekaligus pilar politik luar negerinya, terlebih di sektor energi minyak mentah.

Sementara, penerapan kebijakan Tiongkok untuk mengimpor energi batu bara dari Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindakan ekonomis. Dengan kata lain, kebijakan ini lebih didasarkan pada pertimbangan semata-mata karena kepentingan komersial berbasis hubungan permintaan dan penawaran. Diplomasi ini berada pada level *Business to Bbusiness* (B to B) antara asosiasi perusahaan energi Tiongkok dengan Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia APBI. Diplomasi energi batu bara Indonesia–Tiongkok semata dilakukan untuk tujuan komersial yang relatif bersifat ekonomis untuk memenuhi kebutuhan domestik dari sisi impor dan ekspor.

SIMPULAN

Hingga saat ini, batu bara masih berperan penting dalam neraca perdagangan luar negeri nasional dan pembangunan ekonomi lokal di Indonesia. Proses peralihan dari berbasis batu bara menjadi energi terbarukan otomatis akan mengubah perekonomian Indonesia. Karena itu, komitmen Indonesia terhadap transisi perubahan energi menjadi energi terbarukan perlu lebih diprioritaskan lagi, mengingat batu bara masih menjadi sumber energi utama pada tahun-tahun mendatang, dan energi terbarukan masih menjadi tantangan untuk dikembangkan.

Penelitian ini menemukan bahwa keberpihakan pada energi batu bara yang didukung terutama oleh elit politik dan kepentingan bisnis masih mendominasi dinamika energi Indonesia. Selain itu, konsep ketahanan energi Indonesia juga belum memprioritaskan energi ramah lingkungan serta mengesampingkan dampak yang dapat menimbulkan ketidakadilan yang dihadapi masyarakat lokal, yaitu adanya ketergantungan Indonesia pada batu bara. Diskursus mengenai dinamika energi pada tingkat elit politik dan komunitas akar rumput, khususnya mengenai kondisi transisi energi di Indonesia saat ini, masih menjadi persoalan bagi sekuritisasi energi Indonesia. Seharusnya, pemerintah membuka lebih banyak ruang bagi partisipasi masyarakat, terutama bagi kelompok marginal dan rentan, untuk bisa berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap batu bara dan memastikan transisi energi yang adil di Indonesia. Dalam hal ini, peralihan energi ke energi terbarukan harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik, dan tidak hanya mengenai pengurangan emisi karbon namun juga memastikan hak masyarakat atas kesejahteraan dan kesetaraan terjamin.

Terkait dengan kerjasama bilateral Tiongkok dan Indonesia di bidang energi batu bara, Indonesia diuntungkan karena ekspor batu bara ke Tiongkok semakin meningkat. Karena itu, diplomasi energi Tiongkok dalam mengimpor batu bara dari Indonesia terlihat dari: *Pertama*, dialog antar kedua negara terkait energi. Terdapat tiga dialog energi yang dilakukan Tiongkok dan Indonesia, yaitu dialog Tiongkok yang mengundang Indonesia untuk mengadakan pertemuan di Tiongkok pada 10 April 2019, dialog Tiongkok dan Indonesia menjalin kerja sama perdagangan batubara melalui penandatanganan MoU pada 24 Mei 2019, dan Dialogue on Tiongkok and Indonesia mengadakan “*Tiongkok-Indonesia Coal Procurement Matchmaking Meeting*” yang dilaksanakan secara virtual pada tanggal 25 November 2020.

Kedua, keterlibatan langsung pemerintah dalam kemitraan energi. Pemerintah Tiongkok juga terlibat, antara lain pemerintah Tiongkok mengundang delegasi Indonesia (APBI, Kementerian Perdagangan, staf KBRI Tiongkok) untuk mengadakan pertemuan dengan CNCA, dan pemerintah Tiongkok mendukung CCTDA untuk mengadakan perjanjian kerjasama batubara dengan APBI secara virtual melalui forum “*Tiongkok-Indonesia Coal Procurement Matchmaking Meeting*”.

Ketiga, kegiatan diplomasi energi publik. Melalui tiga dialog yang dilakukan, aktor non negara Tiongkok juga ikut berperan. Pada dialog pertama, CNCA sebagai perwakilan dari Tiongkok berperan penting dalam mengadakan pertemuan dengan delegasi Indonesia. Pada dialog kedua, CNCA berperan penting sebagai representasi Tiongkok karena CNCA menandatangani. MoU dengan APBI pada 24 Mei 2019. Pada dialog ketiga, CCTDA melakukan perjanjian kerja sama dengan APBI pada 25 November 2020.

Berkenaan dengan hubungan perdagangan batu bara dunia ini, Indonesia memiliki kesamaan dan atau kemiripan dengan Tiongkok dalam konteks diplomasi publik. Kedua belah pihak menitikberatkan diplomasi energinya semata dijalankan untuk tujuan kepentingan komersial yang relatif cenderung

bersifat *apolitis*. Tujuan diplomasi Tiongkok adalah mengedepankan kepentingan komersial untuk mewujudkan efisiensi dari pasokan murah akan batubara bersih dari pasar internasional yakni Indonesia.

Kebijakan Tiongkok ini juga sekaligus merupakan upaya untuk melakukan penghematan cadangan energi domestik tanpa risiko kerusakan lingkungan. Sementara itu, Indonesia melakukan diplomasi publik bersifat komersial yang sama dengan yang dilakukan Tiongkok namun berbeda motivasi. Diplomasi publik yang dilakukan terhadap ekspor didasari oleh tujuan untuk memperoleh devisa dari hasil penjualan kelebihan stok batu bara di dalam negeri. Kebijakan ekspor batu bara ini pada akhirnya dapat dinyatakan sesuai dan tidak bertentangan serta tidak mengganggu kepentingan Indonesia untuk mengembangkan sumber energi alternatif non-fosil.

DAFTAR PUSTAKA

- Amira Hasna Febriyanti, Sayyid Al Murtadho and Yassriani Almattushyva (2023). Not So Ambitious? Indonesia's Coal Dependence Amidst The Era of Energy Transition. *Global South Review*, 5(1), pp.47–47. doi:<https://doi.org/10.22146/globalsouth.81488>.
- Arinaldo, D. (2020). *Are coal power plants the best option to provide electricity? A Climate perspective*. [online] IESR. Available at: <https://iesr.or.id/are-coal-power-plants-the-best-option-to-provide-electricity-a-climate-perspective> [Accessed 9 Jan. 2024].
- Arinaldo, D. and Christian, J. (n.d.). Available at: https://iesr.or.id/wpcontent/uploads/2019/08/Indonesias-Coal-Dynamics_Toward-a-Just-Energy-Transition.pdf.
- Atteridge, A., Aung, M. T., & Nugroho, A. (2018). *Contemporary coal dynamics in Indonesia*. Stockholm Environment Institute.
- Aalto, P. (2016). "Russian Energy Diplomacy". Dalam G. Tiess, T. Majumder, & P. Cameron (Eds.). *Encyclopedia of Mineral and Energy Policy*. Jerman: Springer Berlin Heidelberg.
- Adil Fajar Widriani, Imam Supriyadi, & Arifuddin Uksan. (2022). "Ketahanan Energi Nasional Berdasarkan Dimensi Sustainability dalam Memperkuat Pertahanan Negara". *Jurnal Ketahanan Energi*, Volume 8 Nomor 1.
- Buzan, B., Waeber, O., & Wilde, J. (1998). *Security: A Framework for Analysis*.
- Bovan, A., Vučenović, T., & Peric, N. (2020). Negotiating energy diplomacy and its relationship with foreign policy and national security. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10(2)
- BPS-STATISTICS INDONESIA. (2023, July 26). Exports of coal by major countries of destination, 2012-2022. <https://www.bps.go.id/en/statistics-table/1/MTAzNCMx/exports-of-coal-by-major-countries-of-destination--2012-2022.html>
- Creswell, J. W. (2015). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Cycles, T. text provides general information S. assumes no liability for the information given being complete or correct D. to varying update and Text, S.C.D.M. up-to-Date D.T.R. in the (n.d.). *Topic: Coal industry in Indonesia*. [online] Statista. Available at: <https://www.statista.com/topics/5895/coal-power-industry-in-indonesia/#editorsPicks>.
- Hartono, D., Hastuti, S.H., Halimatussadiah, A., Saraswati, A., Mita, A.F. and Indriani, V. (2020). Comparing the impacts of fossil and renewable energy investments in Indonesia: A simple general equilibrium analysis. *Heliyon*, 6(6), p.e04120. doi:<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04120>.
- Hough, P., Malik, S.P., Moran, A. and Pilbeam, B. (2015). *International security studies / theory and practice*. London: Routledge.
- IEA (2020), Informasi Batubara: Ikhtisar , IEA, Paris <https://www.iea.org/reports/coal-information-overview>, Lisensi: CC BY 4.0. Diakses melalui <https://www.iea.org/reports/coal-information-overview/trade>
- IESR. (n.d.). *Implikasi Paris Agreement terhadap masa depan PLTU Indonesia*. [online] Available at: <https://iesr.or.id/pustaka/implikasi-paris-agreement-terhadap-masa-depan-pltuindonesia/> [Accessed 6 Jan. 2024].
- IESR. (n.d.). *Indonesia's Coal Dynamic: Full Report*. [online] Available at: <https://iesr.or.id/pustaka/indonesias-coal-dynamic-full-report/> [Accessed 6 Jan.

2024].

Kemenkeu.go.id. (2024). *Badan Kebijakan Fiskal*. [online] Available at: [https://fiskal](https://fiskal.kemenkeu.go.id/)

Larson, A. (2023). *Understanding How Securitization Can Help with Power Plant Retirements*. [online] POWER Magazine. Available at: <https://www.powermag.com/understanding-howsecuritization-can-help-with-power-plant-retirements/> [Accessed 6 Jan. 2024].

Ordonez, J. A., Jakob, M., Steckel, J. C., & Fünfgeld, A. (2022). 15 Coal, power and coal-powered politics in Indonesia1. *The Political Economy of Coal: Obstacles to Clean Energy Transitions*.

Peraturan Menteri ESDM No. 05 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Di Dalam Negeri

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Qinhua, X. F. E. S. (2007). China's energy diplomacy and its implications for global energy security. *FES briefing paper*, 13, 1-8.

Rizal Sukma, "Indonesia-China Relations: The Politics of Re-engagement," University of California Press Vol. 49 No. 4 (Juli/Agustus 2009), 595-596.

Wang, H., & Xu, Q. (2022). The Emergence and Development of Energy Diplomacy. In *An Introduction to Energy Diplomacy: China's Perspective* (pp. 1-41). Singapore: Springer Singapore.

Wang, H., & Xu, Q. (2022). *An introduction to energy diplomacy: China's Perspective*. Springer Nature.

Wahyuni, E. and Wahyuni, E. (n.d.). *Challenges in Facing Indonesia's Energy Commitment*. [online] Available at: <https://penerbit.brin.go.id/press/catalog/download/562/472/114861?inline=1>.

Widayanto, Sulistyono, et.al, (2023), *Politik Perdagangan Indonesia. Problematika, Pemikiran dan Realitasnya*, Unisri Press, Surakarta.

Sumber internet

CCTDA. (2022). Introduction to China coal transport and marketing association. China Coal Transportation and Distribution Association. Diakses melalui <http://www.cctda.org.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=24&id=932>

Media Indonesia. (2020). "Tiongkok Beli Batu Bara RI. MMSGI Jadi Salah Satu Eksportir". Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/ekonomi/364693/tiongkok-beli-batu-bara-ri-mmsgi-jadi-salah-satu-eskportir>

Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Ministry of Finance. (2020). Advertorial proposed 2021 Budget: Accelerating economic recovery and strengthening structural reforms. https://anggaran.kemenkeu.go.id/assets/FTPPortal/Peraturan/NK%20UU%20APBN%20Lapsem/03c.%20ENG_ADVERTORIALRAPBN2021.pdf

Langlois-Bertrand, S. (2010). The contemporary concept of energy security. *Defence R&D Canada: Centre for Operational Research and Analysis*, 7.

<https://www.merdeka.com/uang/sri-mulyani-transisi-energi-sangat-kompleks-tapi-ada-peluang-investasi-baru.html>

<https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/ekspor-impor>

<https://www.apbi-icma.org/news>

[https://icel.or.id/publikasi-seri analisis/](https://icel.or.id/publikasi-seri-analisis/). Anindarini, G. 2020. Problema Transisi Energi di Indonesia : Antara Energi Baru dan Energi Terbarukan. Seri Analisis Transisi Energi #1. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

<https://www.bps.go.id/id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/statistik-indonesia-2022.html>

<https://www.hellenicshippingnews.com/dry-bulk-annual-review-2022/>

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2969778/sesuai-perintah-jokowi-25-proyek-listrik-35-000-mw-wajib-hijau>

<https://modi.esdm.go.id/produksi-batubara>

<https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2019/04/IESR-Coal-Transition-lowres.pdf>

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2018/01/15/1416/nilai-ekspor-indonesia-desember-2017-mencapai-us-14-79-miliar-dan-nilai-impor-indonesia-desember-2017-mencapai-us-15-06-miliar.html>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190211170952-532-368270/defisit-perdagangan-barang-2018-pertama-dalam-sejarah>

<https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/pemerintah-terus-berupaya-mengurangi-emisi-karbon-untuk-transisi-energi>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201113174335-8-201735/purnomo-yusgiantoro-sebut-ada-4-konsep-ketahanan-energi-ri>

<http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-internasional/603-satu-dekade- · forum-energi Lidya Kristin Sinaga, “Satu Dekade Forum Indonesia-China”>